

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP),
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN DANA
DESA DI KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Penulisan Skripsi Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)
Pada Program Studi Akuntansi



Oleh :

YOHANA OKTAVIA

NPM : 18.1.02.01.0076

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI**

UNP KEDIRI

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi oleh:

YOHANA OKTAVIA
NPM: 18.1.02.01.0076

Judul:

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP),
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN DANA
DESA DI KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI**

Telah Disetujui Untuk Dilanjutkan
Kepada Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal :19 Juli 2022

Pembimbing I



Hestin Sri Widiawati, M.Si
NIDN.0708037605

Pembimbing II



Linawati, S.Pd., M.Si
NIDN.0708048501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh:

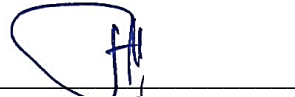
YOHANA OKTAVIA
NPM: 18.1.02.01.0076

Judul:
**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP),
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN DANA
DESA DI KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI**

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNP Kediri
Pada Tanggal : 19 Juli 2022

Panitia Penguji

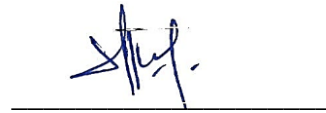
1. Penguji 1 : Hestin Sri Widiawati, S.Pd., M.Si



2. Penguji 2 : Linawati, S.Pd., M.Si



3. Penguji 3 : Erna Puspita, S.E., M. Ak



Menggetahui,

Dean Fakultas Ekonomi



Dr. Subagyo, M.M

NIDN. 0717066601

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Yohana Oktavia
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl. Lahir : Kediri, 15 Oktober 1999
NPM : 18.1.02.01.0076
Fak/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis/S1 Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 19 Juli 2022

Yang Menyatakan



YOHANA OKTAVIA

NPM: 18.1.02.01.0076

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

Filipi 4 : 13

“내가 나인 게 싫은 날

영영 사라지고 싶은 날

문을 하나 만들자 너의 맘 속에다

그 문을 열고 들어가면

이 곳이 기다릴 거야

믿어도 괜찮아 널 위로해줄

Magic Shop”

Magic Shop by BTS

Ku Persembahkan Karya Ini untuk :

- 1. Kedua orangtua yang tak pernah lepas dari doa, dukungan, dan usaha yang terbaik untuk keluarga.**
- 2. Seluruh keluarga tersayang dan orang-orang terdekat yang selalu memberikan semangat**

Abstrak

Yohana Oktavia : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, Skripsi, Akuntansi, FEB UNP KEDIRI, 2022.

Kata kunci : Penerapan SAP, akuntabilitas, transparansi, pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini dilatarbelakangi belum optimalnya pengelolaan Dana Desa yang berada di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri belum diungkap secara maksimal informasi terkait pengelolaan Dana Desa pada papan informasi atau rapat yang melibatkan masyarakat desa, dan belum memaksimalkan penggunaan webside untuk mempublikasikan informasi pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa. Lokasi penelitian bertempat di Desa-desa yang berada di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Pendekatan penelitian dengan metode kuantitatif. Populasi penelitian terdiri dari 135 orang yaitu perangkat desa dan anggota unit desa dari 10 desa yang berada di wilayah Kecamatan Ngancar. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 6 responden dari setiap desa, sehingga jumlah total responden sebanyak 60 responden. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda pada tingkat signifikansi 5%, uji koefisien determinasi, pengujian hipotesis t dan f dengan menggunakan aplikasi SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa dan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa dan secara simultan penerapan SAP, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan, berkah, rahmat, dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

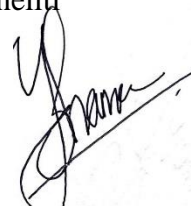
1. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikan kekuatan untuk bertahan dan selalu bersabar dalam setiap proses dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. Zainal Afandi, M.Pd., selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri yang selalu memberikan dorongan motivasi secara implisit kepada seluruh mahasiswanya.
3. Dr. Subagyo, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri yang memberikan semangat kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak., selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.
5. Hestin Sri Widiawati, S.Pd., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing 1
6. Linawati, S.Pd., M.Si sebagai Dosen Pembimbing 2
7. Seluruh dosen yang pernah mengajar saya selama menjadi mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri.
8. Kedua orang tua dan adik penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya selama mengerjakan skripsi ini.

9. Orang-orang terdekat penulis yang sudah membantu doa dan membuat saya semangat untuk mengerjakan skripsi dengan tepat waktu.
10. Teman Seperjuangan Skripsi yaitu Ika, Gris, Sherly, Vinna, Aing, Titis, dan Nita yang selalu mendukung dan memberi semangat penulis.
11. Terima kasih untuk anggota BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung dan Jeon Jungkook yang selalu memberikan hiburan melalui lagu-lagu yang membuat selalu semangat dalam melakukan penelitian ini.
12. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times*

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka tegur sapa, kritik, dan saran-saran, dari berbagai pihak sangat diharapkan. Akhirnya, disertai harapan semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi dunia pendidikan, meskipun hanya ibarat setitik air bagi samudra luas. Penulis berharap dengan disusunnya skripsi ini dapat memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Amiin.

Kediri, 19 Juli 2022

Peneliti



YOHANA OKTAVIA
NPM. 18.1.02.01.0076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
BAB II : KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	11
1. Akuntansi Sektor Publik	11

2. Desa	12
3. Dana Desa	12
4. Pengelolaan Dana Desa	13
5. Standar Akuntansi Pemerintah	15
6. Akuntabilitas	15
7. Transparansi	16
B. Kajian Penelitian Terdahulu	18
C. Kerangka Berpikir	25
D. Kerangka Konseptual	28
E. Hipotesis	29

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Variabel Penelitian	30
1. Identifikasi Variabel Penelitian	30
a. Varabel Terikat	30
b. Variabel Bebas	30
2. Definisi Operasional Variabel	31
B. Pendekatan dan Teknik Pendekatan	32
1. Pendekatan Penelitian	32
2. Teknuk Penelitain	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian	33
1. Tempat Penelitian	33
2. Waktu Penelitian	33

D. Populasi dan Sampel	34
1. Populasi	34
2. Sampel	34
E. Instrumen Penelitian	35
1. Pengembangan Instrumen	35
2. Validitas dan Reabilitas Instrumen	38
a. Uji Validitas	39
b. Uji Reabilitas	39
c. Hasil Uji Validitas dan uji Reabilitas	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41
1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	41
a. Sumber Data	41
b. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
1. Uji Asumsi Klasik	42
a. Uji Normalitas	42
b. Uji Multikolinearitas	43
c. Uji Heteroskedastisitas	44
d. Uji Autokorelasi	44
2. Analisis Regresi Linier Berganda	45
3. Koefisien Determinasi	45
4. Uji Hipotesis	46

a. Uji t	46
b. Uji F	48

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian	49
1. Sejarah Kecamatan Ngancar	49
2. Visi dan Misi Kecamatan Ngancar	50
3. Struktur Organisasi	52
4. Geografi Wilayah	52
B. Karakteristik Responden	53
C. Deskripsi Data Variabel	55
1. Deskripsi Data Variabel Bebas	56
2. Deskripsi Data Variabel Terikat	61
D. Analisis Data	62
1. Uji Asumsi Klasik	62
2. Analisis Regresi Linier Berganda	66
3. Koefisien Determinasi	68
E. Uji Hipotesis	68
1. Uji t	68
2. Uji F	70
F. Pembahasan	71

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	75
-------------------	----

B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 : Kajian Hasil Penelitian Terdahulu	21
3.1 : Variabel Penelitian, Definsi Operasioanl dan Indikator	30
3.2 : Pengambilan Sampel	34
3.3 : Kisi-kisi Instrumen Penelitian	35
3.4 : Hasil Uji Validitas	38
3.5 : Hasil Uji Reabilitas	39
4.1 : Distribusi Pengambilan Kuesioner	52
4.2 : Klasifikasi Responden Berdasarkan Jabatan di Pemerintahan Desa	52
4.3 : Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	53
4.4 : Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	53
4.5 : Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan	54
4.6 : Klasifikasi Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja di Pemerintahan Desa	54
4.7 : Tanggapan Responden terhadap Variabel Penerapan SAP	55
4.8 : Tanggapan Responden terhadap Variabel Akuntabilias	57
4.9 : Tanggapan Responden terhadap Variabel Transparansi	58
4.10 : Tanggapan Responden terhadap Variabel Pengelolaan Dana Desa ...	60
4.11 : Hasil Uji Normalitas	62
4.12 : Hasil Uji Multikoineritas	63

4.13	: Hasil Uji Heteroskedastisitas	64
4.14	: Hasil Uji Autokorelasi	65
4.15	: Hasil Regersi Linier Berganda	65
4.16	: Hasil Analisis Koefisien Determinasi	67
4.17	: Hasil Uji t	68
4.18	: Hasil Uji F	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 : Kerangka Konseptual	27
4.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Ngancar	52

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar	Halaman
1 : Kuesioner Penelitian	80
2 : Rekapitulasi atas Jawaban Responden.....	84
3 : Hasil Uji Validitas.....	92
4 : Hasil Uji Reliabilitas.....	94
5 : Kartu Bimbingan.....	95
6 : Surat Izin Penelitian.....	97
7 : Data Pengelolaan Dana Desa	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan sebuah sistem yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial dan politik negara. Dalam pemerintahan bangsa Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai tanggungjawab terhadap pemerataan kesejahteraan dan pembangunan daerah-daerah. Adapun pemerintah daerah terbagi menjadi dua tingkat, yaitu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Adanya kondisi beberapa daerah di Indonesia yang belum sesuai dengan harapan dari pemerintah pusat, maka pemerintah mengalokasikan dana ke daerah ke dalam APBN.

Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam mengatur otonomi daerah sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun (2014) tentang Pemerintah Daerah. Pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah agar dapat meningkatkan keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pemberian otonomi ini berikan atau disalurkan untuk kepentingan masyarakat terutama di desa. Keberadaan desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun (2014)

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai batas wilayah dengan berwenang untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri, dengan kepentingan masyarakat setempat dan mempunyai hak untuk diakui dalam sistem perintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki peran yang penting dalam di bidang pelayanan publik. Pemerintah desa sebagai tumpuan pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di desa, maka perlu adanya dukungan berupa sumber daya manusia yang berkualitas, dana, sarana dan prasarana sebagai penunjang.

Berdasarkan *Peraturan Pemerintah Nomor 43 pasal 1 Tahun (2014)* bahwa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)** yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Salah satu program dari pemerintahan desa adalah pembangunan desa. Pembangunan desa ini sangat penting dalam mewujudkan Pembangunan Nasional karena adanya pemerataan pembangunan secara langsung berimbas kepada upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pembangunan ini berupa pembangunan fisik dan non fisik, sehingga pemerintah desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban dalam mengatur kepentingan masyarakat desa. Dalam

Pengelolaan dana desa seluruh kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa.

Dalam pengelolaan keuangan tersebut perlu transparansi dan akuntabilitas dengan tujuan agar keuangan desa dikelola dalam keterbukaan, dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan juga untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa juga harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun (2007) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Dengan adanya hal ini masyarakat dapat menilai kinerja perangkat desa yang ada di pemerintahan desa secara langsung, jika kinerja baik maka akan ada apresiasi dari masyarakat dalam kinerja tersebut, namun bila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkap kepada masyarakat maka pemerintah desa belum mewujudkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat umum.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa mulai dari tahap perancangan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Maksud dari pertanggungjawaban ini yaitu tentang laporan keuangan berupa penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan. Adapun dalam pengelolaan dana desa tersebut masih ada ketidaksesuaian dalam jumlah pembangunan yang direncanakan dengan bukti yang ada di lapangan. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun (2014) tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan tujuan agar dalam tahap pengelolaan keuangan desa sesuai antara perencanaan dengan bukti di lapangan.

Transparansi yaitu keterbukaan akses bagi pihak yang membutuhkan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah (Hutapea,2017). Transparansi digunakan untuk kepentingan publik bagi masyarakat yang membutuhkan informasi, maka secara tidak langsung masyarakat bisa terlibat. Dengan meningkatnya permintaan terhadap akuntabilitas dan transparansi yang bertujuan sebagai dorongan kepada instansi pemerintah seperti pemerintahan desa untuk selalu memperbaiki tata kelola pemerintah (*good governance*).

Kecamatan Ngancar berada di Kabupaten Kediri. Desa-desa yang berada di Kecamatan Ngancar memiliki Dana Desa yang cukup besar. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam mengelola laporan keuangan perlu adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Dalam tahapan transparansi pemerintah desa harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui pendapatan dan pengeluaran desa. Tahapan akuntabilitas juga diungkap melalui papan informasi di balai desa ataupun dirapat dan musyawarah pembangunan desa, namun hal tersebut belum dilaporkan secara maksimal.

Fenomena yang ada terkait dengan pengelolaan Dana Desa di desa-desa yang ada di Kecamatan Ngancar ada beberapa permasalahan yang terjadi yaitu belum optimalnya penyerapan anggaran, belum optimalnya dana yang ada di lapangan seperti laporan pengelolaan Dana Desa yang ada di website belum terupdate tepat waktu..

Peneliti tertarik dengan pengelolaan Dana Desa karena Dana Desa mempunyai implikasi yang besar dalam pembangunan desa di Indonesia. Dengan adanya

pembangunan desa dalam hal sarana dan prasarana di Kecamatan Ngancar maka semakin meningkat kesejahteraan masyarakatnya dan juga peran pemerintah desa yang baik.

Dalam pengelolaan Dana Desa harus transparan, akuntabel dan sesuai dengan SAP. Penelitian terdahulu terkait dengan dana desa yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan SAP, memiliki hasil yang beragam. Maka dari itu dengan adanya penelitian ini penulis ingin menguji mengenai pengelolaan Dana Desa.

Penelitian yang dilakukan Bustam (2018) Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran di Kecamatan Larompong Selatan menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa telah sesuai dengan teknis pengelolaan anggaran, dan transparansi anggaran telah dilaksanakan dengan adanya papan informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2019) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa pada Desa Usortolang. Hasil dari penelitian ini dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah belum sesuai dengan PP Nomor 71 tahun (2010).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Umami & Nurodin (2018) yaitu bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap keuangan desa pengelolaan. Berbeda dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2018) bahwa pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang ada di Provinsi Sumatra Utara dan sedangkan transparansi berpengaruh negatif tapi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan penelitian di atas penulis tertarik melakukan penelitian kembali terkait dengan pengelolaan dan desa dengan judul **“Pengaruh Penerapan Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri”**.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan judul penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti pada latar belakang di atas. Maka, dapat diidentifikasi masalah diantara lain :

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dapat menjadi acuan dalam pengelolaan dana desa.
2. Akuntabilitas dalam informasi pengelolaan dana desa dapat diandalkan pemakainya secara wajar.
3. Transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan relevansinya.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan ini ada topik bahasan agar menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Desa-desa yang berada pada wilayah Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.
2. Narasumber dalam penelitian ini yaitu perangkat Desa dan anggota unit Desa yang mengetahui tentang pengelolaan dana desa.
3. Pengelolaan dana desa hanya membahas pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Akuntabilitas dan Transparansi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka perumusan masalah yang timbul adalah :

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa?
2. Apakah akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa?
3. Apakah transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa?
4. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, akuntabilitas, transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial terhadap pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas secara parsial terhadap pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi secara parsial terhadap pengelolaan dana desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, akuntabilitas, transparansi secara simultan terhadap pengelolaan dana desa.

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai hasil dari penelitian ini dapat diharapkan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya pada akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik.
- b. Sebagai informasi dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.
- c. Sebagai acuan dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu pembelajaran bagi penulis dalam bidang penelitian dan mengungkap permasalahan secara sistematis. Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

b. Bagi Lembaga Peneliti/Akademisi

Sebagai bahan kajian materi dalam perkuliahan yang berkaitan dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, akuntabilitas pengelolaan dana desa dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa.

c. Bagi Instansi

Sebagai masukan kepada Pemerintahan desa-desa yang ada di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dalam pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, akuntabilitas serta transparansi dana desa.

d. Penelitian Selanjutnya

Sebagai referensi yang tertarik melakukan penelitian dan juga dapat sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut di bidang akuntabilitas serta transparansi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 164. <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.628>
- Biduri, S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (B. S. Sartika (ed.); Cetakan Pe). UMSIDA Press.
- Bustam, M. (2018). *ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)*.
- Daerah, U. undang tentang P. (2014). *Undang-undang tentang Pemerintah Daerah (UU No 23 Tahun 2014)* (Vol. 1, Issue hal 140, p. 43). <http://www.springer.com/series/15440%0Apapers://ae99785b-2213-416d-aa7e-3a12880cc9b9/Paper/p18311>
- Elkha, F., & Wahidawati. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–19.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS*. (Cetakan ke). BP Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Handayani, M. (2019). *Akuntansi Sektor Publik* (A. Pramono (ed.)). Poliban PRESS.
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Hidayat, D., Sari, M., & AR, F. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal*

- Valuta*, 7(1), 1–13.
- Hutapea, D. H. (2017). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi:Desa Di Kecamatan Sunggul Kabupaten Delidrt dang)*.
- Kadang, S. B., Laloma, A., & Tampongangoy, D. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(103), 3.
- Launtu, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 18(1), 14–27.
<https://doi.org/10.37476/akmen.v18i1.1318>
- Lubis, S. M. Y. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal). *Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Menteri, P. (2015). *Peraturan Menteri tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Permen Nomor 21 tahun 2015 Tahun 2016)* (pp. 1–38).
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149–162.
<https://ejurnal.id/index.php/jsak/issue/view/26>
- Nawangsari, H. C. P. (2021). Apakah Website Desa Sudah Memuat Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa? *Jurnal Investasi*, 7(2), 13–21.
<https://investasi.unwir.ac.id/index.php/investasi/article/view/132/77>
- Negeri, P. P. D. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Permendagri Nomor 37 Tahun 2007)*.
- Pemerintah, P. (2010). *Peraturan Pemerintah tentang Penyajian Laporan Keuangan (PP No 71 Tahun 2010)* (Vol. 9, Issue 1, pp. 76–99).
- Pemerintah, P. (2014). *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU no 6 Tahun 2014 (PP No 43 Tahun 2014 pasal 1)*. 1(hal 140), 43.
<http://www.springer.com/series/15440%0Apapers://ae99785b-2213-416d-aa7e-3a12880cc9b9/Paper/p18311>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2014a). *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa (Permendagri No 114 Tahun 2014)*. 1–34.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2014b). Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendragi No 113 Tahun 2014). In *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia* (Vol. 72, Issue 10, pp. 1–13). [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri.No.20.TH.2018+Lampiran.pdf)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri No 20 Tahun 2018)*.
- Peraturan Pemerintah. (2014). *Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa (PP No 60 Tahun 2014)* (pp. 1–8).
- Setyawati, V. D., & Ferdinand, D. Y. Y. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pemaknaan masyarakat desa secara kualitatif. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(2020), 122–127. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/13665>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Umami, & Nurodin, I. (2018). Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Punagaya Kecamatan Bangala Kabupaten Jonoponto. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi*, 6(11), 74–80.
- Wardani, D. K., & Utami, R. R. P. (2020). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 28(1), 35–50. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.376>
- Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. *Lppm Umsb, XII*(11), 118–126.
- Yomersianus Seran, F., Bahri, S., & Prasetyaning Pawestri, H. (2021). Analisa Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Pada Desa Umanen Lawalu Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur. *Http://Publishing-Widyagama.Ac.Id/Ejournal-v2/Index.Php/WNCEB, Wnceb*, 1–11. <https://ntt.bpk.go.id/kabupaten-malaka>